

**KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PEMBENTUKAN  
REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)**

**Oleh: Randy Aulia Isan<sup>1</sup>  
(randyauliaisan@yahoo.co.id)**

**Pembimbing : Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si**

**Bibliografi : 17 Jurnal dan Paper Ilmiah, 16 Buku, 35 Website, 2 Dokumen Penting**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research explains the Chinese interest in the Regional Comprehensive Economic Partnership and its connection to the East Asian region. Regional Comprehensive Economic Partnership is a form of free trade agreement comprising 10 ASEAN countries and the 6 ASEAN FTA partners. Complexity that occurred in East Asia between China and Japan, Japan and South Korea, China and South Korea, affect completion of negotiations Regional Comprehensive Economic Partnership.*

*This research used perspective neoliberalism as a reference to analyze the interest of Chinese in the Regional Comprehensive Economic Partnership. This research also used the theory of international cooperation to see the development of relations in East Asia. In addition, this study also uses the concept of regional integration to see direction of the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement.*

*The final result of this research is the China interests to improve political economy in the East Asian region through the Regional Comprehensive Economic Partnership. To achieve this purpose, China use the Regional Comprehensive Economic Partnership in an effort to improve relations and cooperation to Japan and South Korea. China also intends to complete the Regional Trade Agreement which called the China-Japan-Korea Free Trade Agreements.*

*Keywords : Regional Comprehensive Economic Partnership, China Interests, political economy, regional integration.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2011

## I. Pendahuluan

Penelitian ini akan menganalisa tentang kepentingan Tiongkok dalam fenomena proses penggabungan kekuatan ekonomi di kawasan Asia Timur, yaitu antara negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melalui pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Salah satu bentuk kerjasama yang akan dilakukan ketiga negara ini yaitu membentuk *Free Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Bebas). Antar daerah internasional, Asia Timur adalah satu-satunya wilayah besar tanpa perjanjian perdagangan tingkat wilayah.

Sejak krisis keuangan Asia, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, tiga negara utama di Asia Timur Laut, telah menyadari perlunya kerjasama keuangan dan perdagangan yang lebih dalam diantara mereka. Dalam keadaan ini, mereka sudah mulai mengikuti tren global yang terus meningkat terhadap pembentukan FTA. Salah satu ciri khas dari pembentukan FTA di Asia Timur patut dicatat adalah bahwa mitra FTA mereka cenderung ekstra-regional.<sup>2</sup>

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan di Asia yang terdiri dari negara-negara yang cukup kuat dan berpengaruh, beberapa diantaranya Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Keberadaan negara-negara tersebut di Asia Timur menyebabkan kawasan ini menjadi sebuah kawasan strategis dalam hubungan internasional. Asia Timur juga diwarnai dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya

yang kondusif dan beragam. Setiap negara berada di bawah tekanan pasar yang kuat untuk terus meningkatkan kemampuan dan menaiki tangga pembangunan.<sup>3</sup>

Asia Timur menjadi lebih diperhitungkan lagi ketika memasuki era pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin dapat dikatakan menjadi titik balik dari Asia Timur sebagai sebuah kawasan yang patut untuk diperhitungkan. Di mana pada dekade 1990an negara-negara Asia Timur semakin mengukuhkan kekuatannya melalui pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat. Hal ini dimulai dari keterbukaan ekonomi Tiongkok, yang mana tidak saja berdampak pada hubungan bilateral Tiongkok saja namun juga Asia Timur secara keseluruhan.

Sejak akhir dekade 70-an Deng Xiao Ping membuat Tiongkok mulai terbuka dengan dunia luar dan mulai membuka pintu bagi investasi asing. Kunjungan presiden Nixon ke Beijing tahun 1972 sesungguhnya sudah merupakan isyarat bakal terjadinya perubahan politik luar negeri Tiongkok. Penarikan pasukan Amerika dari Vietnam tahun 1975 menandai perubahan perimbangan kekuasaan di Asia.<sup>4</sup> Semenjak itu Tiongkok mulai berhubungan dengan negara-negara di Asia termasuk ASEAN.

Dengan keterbukaan ekonominya, Tiongkok mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia, termasuk negara di Asia Tenggara. Tidak hanya menjalin hubungan dengan negara diluar Asia Timur, Tiongkok juga menjalin hubungan di dalam

---

<sup>2</sup> Choi, Youngmi. *Political Economy of Free Trade Agreements in China, Japan, and South Korea: Sectoral and National Security Politics of the FTA Wave*. 2013. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science at The University of Wisconsin-Milwaukee. Hlm 95.

---

<sup>3</sup> Ohno, Kenichi. *The East Asian Experience of Economic Development and Cooperation*. Desember 2002. National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

<sup>4</sup> Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 170.

kawasan ini sendiri. Kemudian, negara-negara di kawasan Asia Timur mulai mengadakan hubungan dengan negara lain melalui masuknya negara-negara tersebut ke dalam beberapa organisasi internasional. Meningkatnya kekuatan wilayah Asia Timur terutama dalam bidang perekonomiannya tidak serta merta melepaskan Asia Timur dari persoalan lain terkait dengan perbatasan, status politik, isu sejarah, sengketa wilayah, dan yang lain.

Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur terus menarik perhatian dunia. Diawali dengan pemulihan ekonomi dari dampak krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997-1998.<sup>5</sup> Krisis yang terjadi tersebut memunculkan sebuah inisiasi baru untuk membuat sebuah pertemuan regional dalam level pemerintahan dengan melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, dengan dibentuknya ASEAN Plus Three (APT).

Salah satu forum yang terbentuk sebagai pengaruh dari APT adalah lahirnya *East Asia Summit* (EAS) pada tahun 2005, yang merupakan forum regional terbuka yang muncul di kawasan Asia Timur. Sejak awal pembentukannya, terdapat 16 negara peserta EAS, yaitu 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru. EAS merupakan forum *leaders-led summit* dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak (*driving force*).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Bermand Hutagalung. 29 Februari 2012. *Mencermati Penjajakan Kerjasama Ekonomi Perdagangan Kawasan Asia Timur*. Tersedia di <<http://www.slideshare.net/bermand/mencermati-kerjasama-ekonomi-asia-timur>> diakses pada 12 Juli 2016.

<sup>6</sup> Tabloid Diploamsi. 17 Juni 2012. *Kerjasama East Asia Summit Memperkuat Ketahanan dan Daya Saing Kawasan*. Tersedia di <<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/165-diplomasi-juni-2012/1444-kerja-sama-east-asia-summit-eas-memperkuat-ketahanan-dan-daya-saing-kawasan-.html>> diakses pada 12 Juli 2016.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APT pertama kali diselenggarakan pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur pada saat Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Pembentukan APT menjadi sebuah pengaruh awal bagi pembentukan forum-forum yang lain seperti ASEAN Regional Forum (ARF), *East Asia Summit* (EAS) pada tahun 2005, dan China-ASEAN Special Relationship. Fenomena ini membuat sebuah integrasi baru Asia, terutama di kawasan Asia Timur yang mana belum ada pembentukan organisasi regional untuk kawasan tersebut. Faktor yang mengakibatkan belum terbentuknya organisasi regional di Asia Timur karena adanya permasalahan antara Tiongkok-Jepang, Tiongkok-Korea Selatan, dan Jepang-Korea Selatan yang belum terselesaikan.

Upaya untuk mempromosikan kerjasama ekonomi trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (CJK) saat ini sudah lebih dari satu dekade lamanya. Pada tahun 1999, para kepala negara dari tiga negara Asia Timur ini sepakat untuk mengadakan pertemuan tahunan (KTT trilateral) di sela-sela pertemuan APT. Pada tahun-tahun awal berdirinya, KTT trilateral hanya berupa pertemuan singkat. Tahun-tahun antara 2002-2009, dalam banyak hal menjadi periode perkembangan yang lebih baik untuk kerjasama ekonomi trilateral, dengan tiga negara melakukan beberapa putaran kajian resmi mengenai pro dan kontra dari CJK FTA.

Awal pertemuan ketiga negara pada tanggal 29-30 Mei 2010 telah membuka lembaran baru dalam kerjasama trilateral. Ketiga negara membahas sebuah peta jalan sebagai garis besar arah kerjasama sepuluh tahun kedepan. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak, Perdana Menteri Jepang Yukio

Hatoyama dan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao mengadakan pertemuan di Pulau Jeju pada tanggal 29-30 Mei 2010. Pertemuan ini juga menarik perhatian khususnya karena diadakan setelah diumumkannya hasil penyelidikan tenggelamnya kapal Cheonan. Pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan yang kongkret karena ketiga negara menyepakati visi kerjasama untuk sepuluh tahun ke depan.<sup>7</sup>

Di tingkat regional, CJK FTA memiliki potensi untuk menjadi tulang punggung dari FTA multilateral dalam bentuk region-wide FTA di Asia Timur pada awalnya dan Asia secara keseluruhan. Pembentukan *region-wide* FTA di Asia merupakan inti rekomendasi yang telah dibuat oleh studi terbaru pada integrasi ekonomi Asia. *Region-wide* FTA juga bisa memungkinkan negara-negara Asia untuk secara bertahap berbicara dengan posisi bersatu pada perdagangan internasional dan investasi di forum global dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pemerintahan ekonomi global.<sup>8</sup>

Tiga negara di kawasan Asia Timur yang diantaranya yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan selalu diliputi masalah sejak usainya perang dunia II. Hubungan ketiga negara ini tidak terlepas dari isu-isu sejarah antara lain isu jugun ianfu dan sengketa wilayah. Namun dibalik permasalahan yang ada, ketiga negara tetap mengadakan hubungan kerjasama berupa perdagangan dan kerjasama ekonomi

lainnya. Salah satu bentuk kerjasama ini yaitu mulai diadakan pertemuan-pertemuan trilateral dan dibentuknya *Regional Comprehensive Economic Partnership*.

Ditengah perselisihan sejarah dan wilayah, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang sepakat bekerja sama demi integrasi ekonomi yang besar dalam pertemuan di Seoul, Korea Selatan 1 November 2015. Park menyatakan dia bersama Abe dan Li akan berupaya menyelesaikan pakta perdagangan bebas 16 negara. Juga perdagangan bebas ketiga negara yang telah ditandatangani pada 2013.

RCEP merupakan gagasan untuk mengintegrasikan kerjasama anggota ASEAN dengan negara-negara mitra dagangnya, yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia. ASEAN sudah menjalin kerjasama dengan enam negara itu, yakni ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN Korea FTA, ASEAN-Australia Selandia Baru FTA, dan ASEAN-India FTA. Namun, kerap muncul permasalahan akibat aturan perdagangan yang berbeda dari setiap FTA. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan untuk mempergunakan kemudahan-kemudahan, misalnya keringanan bea masuk (BM), yang telah disepakati dalam FTA. RCEP dirumuskan dengan maksud untuk menyederhanakan aturan-aturan yang berbeda tersebut. RCEP dijadwalkan dimulai pada 2016, kepala negara dan pemerintahan 10 negara ASEAN dan enam negara mitra mendukung rencana RCEP.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> KBS world, 31 Mei 2010. *Pertemuan Korea Selatan-Tiongkok-Jepang mendorong terciptanya Kerjasama Trilateral*. Tersedia di <[http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news\\_issue.htm?no=18468](http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=18468)> diakses pada 17 Desember 2015.

<sup>8</sup> Madhur, Srinivasa. 2013. China-Japan-Korea FTA: A Dual Track Approach to a Trilateral Agreement. *Journal of Economic Integration: Vol.28 No.3*. hlm 376.

<sup>9</sup> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *RCEP rugikan sektor jasa dan manufaktur*. Tersedia di <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/8778/RCEP->

## Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Landasan berpikir inilah yang akan penulis gunakan dalam menganalisa suatu fenomena yang patut untuk diteliti. Dalam membahas sebuah kasus penulis harus memiliki teori dan perspektif yang jelas. Dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengemukakan teori dan perspektif yang dipakai, serta konsep dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, untuk membantu menjelaskan prospek hubungan ekonomi antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, penulis menggunakan perspektif neoliberalisme di mana yang menjadi aktornya adalah negara-bangsa. Perspektif neoliberal memandang globalisasi yang dicirikan oleh liberalisasi ekonomi sebagai proses yang menciptakan *positive sum game*.<sup>10</sup> Artinya semua partisipan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari globalisasi ekonomi dengan syarat negara atau masyarakat tersebut mampu meningkatkan daya saingnya dalam percaturan dan perdagangan global.

Poin utama dari neoliberalisme di antaranya adalah:

1. Liberalisasi perusahaan-perusahaan dari segala bentuk ikatan yang dilakukan pemerintah, tidak ada lagi aturan harga, kebebasan dalam proses keuangan, permodalan, bisnis, barang dan jasa, serta perdagangan dan investasi yang terbuka luas secara internasional;
2. Privatisasi. Jual BUMN, barang dan jasa kepada investor swasta. Ini termasuk bank, industri kunci, jalur kereta api,

jalan raya tol, listrik, sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Meskipun biasanya dilakukan atas nama efisiensi, privatisasi membuat publik membayar lebih untuk kebutuhannya;

3. Menghilangkan konsep "masyarakat baik" dan menggantinya dengan "tanggung jawab individu." Menekan orang-orang termiskin di masyarakat untuk mencari solusi untuk kurangnya perawatan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial semua sendiri, maka menyalahkan mereka jika mereka gagal, seperti "malas."<sup>11</sup>

Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas, dengan pembenaran yang mengacu pada kebebasan. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara dengan mengurangi atau bahkan tanpa pajak atau tanpa hambatan perdagangan. Para penganut neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas dan adanya kompetisi bebas itu karena adanya pasar bebas (*free trade*).

Harga ditentukan oleh pasar, hal ini menyebabkan hilangnya atau berkurangnya peran pemerintah suatu negara. Sesungguhnya pendirian neoliberalisme ditandai dengan karakter kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta melakukan produksi. Bagi neoliberalis, *free trade* merupakan cara terbaik dan lebih damai dalam usaha mencapai keuntungan ekonomi karena *free trade* juga akan menambah tingkat saling pengertian dan hubungan kerjasama antar negara karena kerjasama yang saling

---

Rugikan-Sektor-Jasa-dan-Manufaktur> diakses pada 11 maret 2016

<sup>10</sup> Aleksijs Jemadu. 2005. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Graha Ilmu. Hlm. 231.

---

<sup>11</sup> Martinez, E. dan Garcia, A. *What is Neoliberalism?*. Tersedia di <<http://www.corpwatch.org/article.php?id=376>> diakses pada 27 Desember 2015.



menguntungkan sehingga dapat mengurangi potensi konflik.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kerjasama internasional. Asumsi dasar dari teori ini adalah karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya, sehingga perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama internasional ini dirumuskan dalam bentuk perjanjian, yang kemudian dengan perjanjian itu dilaksanakan oleh negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya.<sup>13</sup>

Menurut K. J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus;
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya;
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan;

<sup>12</sup> Weber, Cynthia. *International Relations Theory: A Critical Introduction*, 3<sup>rd</sup> ed. New York: Routledge. 2009. Hlm. 110.

<sup>13</sup> Lihat tulisan Juwana, Hikmanto, 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm. 87.

<sup>14</sup> Holsti, K. J., 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. Hlm. 652-653.

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan;
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan perspektif neoliberalisme dan teori kerjasama internasional, penulis menggunakan juga konsep regional integration. Konsep ini merumuskan bagaimana proses membangun sebuah wewenang (authority) pada tingkat supra-nasional melewati negara-bangsa di dalam lingkup wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan karakteristik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>15</sup> *Regional integration* melihat bagaimana usaha yang dilakukan untuk meningkatkan proses yang terjadi secara politik dan ekonomi dalam kerjasama antar negara-negara dan aktor-aktor lainnya dalam kawasan (region) tersebut.

## II. Isi

*Regional Comprehensive Economic Partnership* merupakan suatu negosiasi *Free Trade Agreement* yang disepakati oleh 16 negara: 10 negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN – Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Sehubungan dengan RCEP enam negara non-ASEAN ini dikenal sebagai ASEAN *Free Trade Partners* (AFP). Para peserta dari negosiasi RCEP memiliki populasi total lebih dari 3 milyar orang dan pangsa perdagangan diperkirakan 27% dari perdagangan global.

<sup>15</sup> Diez, Thomas. et. al. 2011. *Key Concepts in International Relation*. London: Sage Publications. Hlm. 187-188

Negosiasi RCEP dibentuk oleh pemimpin dari 16 negara yang berpartisipasi dalam *East Asia Summit* pada tanggal 20 November 2012. Mereka mengumumkan bahwa RCEP akan menjadi “perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan dengan membangun perdagangan terbuka dan lingkungan investasi di daerah untuk memfasilitasi perluasan perdagangan regional dan investasi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pembangunan.” Para Pemimpin membentuk *Guiding Principles* untuk negosiasi. Prinsip negosiasi ini telah disetujui oleh Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 30 Agustus 2012 dan disahkan oleh negara anggota RCEP.

RCEP merupakan langkah yang signifikan dalam evolusi kerangka kebijakan perdagangan di Asia Timur selama dekade terakhir. Pembentukan RCEP ini seolah mengulang kembali fenomena beberapa tahun yang lalu. Dimulai dari proses terbentuknya FTA antara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (dikenal sebagai ASEAN+3). Seterusnya pada tahun 2007 dengan dibentuknya ASEAN+6 FTA, yang termasuk ASEAN+3 mitra ditambah Australia, India, dan Selandia Baru. Kedua fenomena ini menyimpulkan arah terciptanya konsep RCEP.

Setelah proses persiapan, negara-negara peserta memulai negosiasi formal di bulan Mei 2013. RCEP akan mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa/masalah hukum dan

kelembagaan dan isu-isu lain yang perlu diidentifikasi selama proses negosiasi.<sup>16</sup>

RCEP adalah strategi yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan regional dengan memastikan pasar negara-negara yang berpartisipasi tetap terbuka dan kompetitif. Mengingat keberadaan keragaman FTA di daerah tersebut, negosiasi RCEP kemungkinan akan membosankan dan kompleks. Namun 16 pemimpin telah berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan mendukung *Guiding Principles*, sebuah dokumen yang membuka kemungkinan mitra ekonomi regional lainnya untuk bergabung kedalam perjanjian.

Proses negosiasi dapat difasilitasi dengan mengidentifikasi karakteristik utama dari perjanjian ASEAN yang ada dengan enam mitra perdagangan regionalnya. Negosiasi akan dibangun berdasarkan pada FTA ASEAN+1 karena mulai dari awal akan terlalu rumit, namun proses akhirnya harus memerlukan integrasi dan liberalisasi semua FTA ASEAN. Pada perdagangan barang, misalnya, ASEAN+6 negara menggunakan klarifikasi tarif yang berbeda untuk konsensi tarif mereka, sehingga sulit untuk membangun jadwal ke depan yang lebih mudah.<sup>17</sup>

### **Regionalisme dan *Free Trade Agreement***

Bagi para penganut regionalisme, kerjasama regional dianggap sebagai salah

---

<sup>16</sup> WTO Center. 16 Juli 2015. *Negotiations Update Regional Comprehensive Economic Partnership*. Tersedia di <<http://wtocenter.vn/other-agreement/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>> diakses pada 15 Juli 2016.

<sup>17</sup> East Asia Forum. 3 Desember 2012. *The Way Forward for RCEP Negotiations*. Tersedia di <<http://www.eastasiaforum.org/2012/12/03/the-way-forward-for-rcep-negotiations/>> diakses pada 15 Juli 2016.

satu alternatif antara kenyataan dan harapan, yaitu anarki internasional (kenyataan sekarang) dan integrasi global (harapan masa depan). Mereka berpendapat bahwa kedekatan hubungan secara budaya, ekonomi, politik dan geografi pada suatu wilayah, dan peran serta negara-negara dalam suatu organisasi yang efektif akan meminimalisasi pengaruh negara-negara kuat dalam suatu kawasan.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi kesimpangsiuran berbagai aliran dalam perdagangan internasional, diadakanlah suatu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* = *GATT*). *GATT* terbentuk dalam rangka perundingan untuk membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional. Dilihat dari pihak yang membuatnya *GATT* adalah suatu perjanjian internasional antarpemerintah negara-negara.<sup>19</sup> Dasar falsafah yang dianut oleh *GATT* adalah asas nondiskriminasi, artinya semua negara yang ikut dalam perdagangan antar bangsa harus patuh pada ketentuan-ketentuan yang sama dan tidak ada perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, prinsip ini disebut juga dengan *Most Favoured Treatment*. Kelemahan utama dari ketentuan *GATT* adalah adanya anggapan bahwa semua negara yang ikut dalam perdagangan internasional mempunyai kekuatan dan tingkat kemajuan yang sama.<sup>20</sup>

*Free Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Bebas) adalah perjanjian antar

negara untuk menghapus hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor. FTA diakui oleh WTO di *GATT* Pasal 24 dan Pasal 5 dari *General Agreement on Trade in Services* (*GATS*). *Regional Trade Agreements* (*RTAs*) adalah istilah kolektif yang digunakan oleh WTO untuk merujuk pada FTA dan pengaturan lain daerah perdagangan istimewa.<sup>21</sup>

### **RCEP sebagai FTA bagi ASEAN**

ASEAN saat ini sedang melakukan negosiasi RCEP untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan ASEAN dalam FTA dengan mitra dagangnya yakni Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Dinamisme ekonomi ASEAN diharapkan dapat memberikan manfaat dari RCEP yang akan memberikan dasar untuk integrasi regional yang lebih luas. Ketika sudah berjalan, RCEP akan memberikan manfaat yang nyata melalui perbaikan potensi akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan aturan regulasi dan kerjasama. Selanjutnya, hal ini akan memberikan lebih banyak pilihan dan kesempatan bagi masyarakat ASEAN untuk berpartisipasi pada situasi rantai nilai global.

Negosiasi RCEP diluncurkan oleh pemimpin dari 10 negara-negara anggota ASEAN dengan 6 negara mitra FTA pada pertemuan *East Asia Summit* di Phnom Penh, Kamboja pada tahun 2012. Tahun 2014, 16 negara anggota terdiri dari lebih dari 3 milyar orang, dengan GDP gabungan sekitar 22,7 Triliun dolar AS dan menyumbang hampir 30% dari perdagangan dunia. Meliputi bidang inti negosiasi untuk memasukkan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama

<sup>18</sup> Asrudin., Mirza Jaka Surya dkk (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Graha ilmu. Hlm 137

<sup>19</sup> Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO : Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 63.

<sup>20</sup> Dam, Sjamsumar., Riswandi (1995). *Kerja Sama ASEAN – Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 96.

<sup>21</sup> Urata, Sujiro. 2002. Globalization and the Growth in Free Trade Agreements. *Asia-Pacific Review*, Vol.9, No.1 (hlm 20-21).



ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa dan masalah lain yang relevan. RCEP diharapkan untuk menjadi berkualitas tinggi yang modern, komprehensif, dan menjadi perjanjian kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Negosiasi dimulai pada Mei 2013 dan dipandu oleh *Guiding Principles* untuk keberlangsungan negosiasi. Perjanjian RCEP akan membangun kemajuan yang dibuat di bawah ASEAN+1 FTA dan akan memberikan hasil yang memuaskan dan seimbang, mengakui individu dan keadaan beragam dari negara-negara peserta.<sup>22</sup>

### **Pengaruh RCEP terhadap kawasan Asia Timur**

Perspektif neoliberalisme menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dari suatu kompetisi bebas, dan adanya kompetisi bebas itu karena adanya pasar bebas. Konsep ekonomi ini pada awal perkembangannya mengacu pada penjualan produk antar negara dengan mengurangi atau bahkan tanpa pajak atau tanpa hambatan perdagangan. Namun seiring perkembangan ekonomi secara global, kebebasan disini berkembang bukan hanya pada perdagangan barang saja, tetapi sudah mencakup perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi, kekayaan intelektual, dan lainnya.

Liberalisasi ekonomi yang dicirikan dalam perspektif neoliberal memungkinkan semua partisipan dalam perdagangan bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat negara atau aktor tersebut mampu meningkatkan daya saingnya dalam

percaturan dan perdagangan global. Pada tulisan ini, penulis melihat dari sudut pandang Tiongkok sebagai salah satu aktor yang bertujuan mendapatkan keuntungan dalam pembentukan RCEP, yang salah satunya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi politik di kawasan Asia Timur. Tiongkok menjadikan RCEP sebagai suatu wadah untuk menjembatani dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Asia Timur. Dengan terbentuknya suatu kerjasama antar negara-negara Asia Timur tersebut di dalam RCEP akan memungkinkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi politik yang terjadi di Asia Timur kearah yang lebih baik.

Salah satu konflik yang paling jelas saat ini adalah panasnya hubungan antara Tiongkok dan Jepang. Permusuhan kedua negara ini sudah mengakar bahkan dari masa perang. Mengingat kawasan Asia Timur merupakan suatu area geopolitik dan geostrategi yang sangat berpengaruh, kedua negara harus segera memperbaiki hubungan untuk keamanan, stabilitas dan kemakmuran Asia Timur. Tiongkok dan Jepang harus bersama-sama meningkatkan peran positif di dunia dan bersama-sama membangun pusat peradaban baru di Asia.

Dengan bertemunya kedua negara di dalam negosiasi RCEP terlihat membuahkan hasil pada tahun 2015 ketika kedua negara bertemu kembali dalam KTT trilateral antara Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan, serta sepakat untuk memperbaiki hubungan kearah yang lebih baik dan juga meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Pertemuan resmi antara Tiongkok dan Jepang juga terjadi pada Oktober 2015.<sup>23</sup> Kedua pihak sepakat arti pentingnya

---

<sup>22</sup> ASEAN Community. 2015. *Regional Comprehensive Economic Partnership A Coherent Approach towards Economic Integration*. Tersedia di <<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20RCEP.pdf>> diakses pada 25 Juli 2016.

---

<sup>23</sup> VOV Internasional. 31 Oktober 2015. *Tiongkok dan Jepang Sepakat Mendorong dan Memperbaiki Hubungan bilateral*. Tersedia di <http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Tiongkok-dan->

pendorongan dan perbaikan hubungan bilateral serta bersedia mendorong pertukaran-pertukaran yang lebih dekat di bidang-bidang perdagangan, ekonomi, budaya, kebudayaan dan pergaulan.

Upaya perbaikan hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang terus dilakukan demi kondisi ekonomi politik Asia Timur yang lebih baik. Salah satu upaya dilakukan dengan pertemuan resmi kedua negara untuk membahas dan meluruskan isu-isu sensitif. Pada 30 April 2016, Tiongkok mengajukan syarat untuk perbaikan hubungan dengan Jepang, dan memberitahu Menteri Luar Negeri Jepang yang berkunjung ke Beijing bahwa tidak boleh ada "kekaburan dan perubahan" dalam memenuhi tuntutan Tiongkok atas penafsiran sejarah, hubungan dengan Taiwan dan hal-hal penting lainnya. Beijing menggambarkan Fumio Kishida itu sebagai sikap yang ingin berdialog dengan Tiongkok yang sedang marah, sementara kedua pihak berusaha memperbaiki hubungan yang dipersulit oleh sengketa wilayah, sejarah dan persaingan akan pengaruh di Asia Timur. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memberitahu Kishida bahwa hubungan harus didasarkan pada "penghormatan pada sejarah, pematuhan janji, dan berdasarkan kerjasama bukan konfrontasi."<sup>24</sup>

### **Hubungan Ekonomi Internasional Tiongkok**

Ekonomi internasional merupakan suatu sistem pola-pola dan lembaga-lembaga dalam proses arus barang dan jasa serta uang

diantara negara-negara bangsa di dunia (sistem internasional). Namun tidak seperti halnya pola sistem pengorganisasian dan sentralisasi ekonomi dalam negeri. Dalam hal ini negara memiliki otoritas membuat keputusan-keputusan penting yang akan mempengaruhi seluruh sistem perekonomian. Dalam hal ini ekonomi internasional yang memiliki posisi sebagai produk dan pengambilan keputusan yang disentralisasikan (*decentralized decision making*).

Pasar internasional terdiri dari unsur-unsur arus barang dan jasa (*flow of goods and services*) yang melampaui batas-batas kedaulatan negara (nasional) atau dengan perkataan lain disebut sebagai "*across national boundaries*". Suatu arus yang ditentukan oleh kondisi-kondisi ekonomi dan politik. Tetapi yang lebih penting dalam kaitan ini adalah sifat saling ketergantungan (*interdependen*) antar-bangsa di dunia, mengalami perkembangan yang sangat cepat.<sup>25</sup>

Tiongkok bergabung dengan WTO pada Desember 2001 dan merupakan titik balik utama dalam liberalisasi ekonomi. Dengan bergabung ke dalam WTO, Tiongkok beralih dari perekonomian tertutup untuk sekali lagi terintegrasi dengan komunitas global. Pada akhirnya, Tiongkok perlu untuk memberikan perlakuan istimewa kepada semua anggota WTO, memberikan perlakuan yang sama, dan tidak membedakan antara barang produksi dalam negeri dan impor.

Menurut Departemen Perdagangan Tiongkok (*China's Ministry of Commerce/MOFCOM*), Tiongkok telah menandatangani perjanjian perdagangan

---

Jepang-sepakat-mendorong-dan-memperbaiki-hubungan-bilateral/380753.vov diakses pada 29 Juli 2016.

<sup>24</sup> VOA Indonesia. 1 Mei 2016. *China Ajukan Syarat Perbaikan Hubungan dengan Jepang*. Tersedia di <<http://www.voaindonesia.com/a/china-ajukan-syarat-perbaikan-hubungan-dengan-jepang/3309982.html>> diakses pada 1 Juni 2016.

---

<sup>25</sup> Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 222, 223.

dengan 12 mitra berbeda (Tabel 1). Mengingat bahwa ASEAN memiliki 10 negara anggota, dan bahwa MOFCOM tidak mengkategorikan *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) dengan Taiwan sebagai FTA, Tiongkok sebenarnya memiliki perjanjian perdagangan dengan 22 mitra dagang. Sebagai tambahan pada RCEP, Beijing juga mempertimbangkan enam negosiasi perjanjian terdiri atas tambahan 11 negara. Artinya menjadikan total mitra perjanjian perdagangan Tiongkok, secara umum menjadi 33 negara. Jika negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) dimulai, seperti yang diusulkan Tiongkok pada tahun 2014, daftar mitra dagang Tiongkok akan tumbuh lebih jauh.

**Tabel. 1** *China's Free Trade Agreements*

Partner	First signed	Participants	Geography	Phasing of agreement	WTO reporting
<i>Signed</i>					
ASEAN	2002	Multi-Partner	Proximate	Step-by-step: Framework (2002), goods (2004), services (2007), investment (2009)	Enabling Clause & GATS Art. V
Hong Kong	2003	Bilateral	Proximate	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Macau	2003	Bilateral	Proximate	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Chile	2005	Bilateral	Distant	Step-by-step: goods (2005), services (2008)	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Pakistan	2006	Bilateral	Proximate	Step-by-step: goods (2006), services (2009)	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
New Zealand	2008	Bilateral	Distant	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Singapore	2008	Bilateral	Proximate	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Peru	2009	Bilateral	Distant	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Costa Rica	2010	Bilateral	Distant	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Taiwan	2010	Bilateral	Proximate	Step-by-step: framework (2010), goods and services (not signed yet)	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Switzerland	2013	Bilateral	Distant	Single undertaking	GATT Art. XXIV & GATS Art. V
Iceland	2013	Bilateral	Distant	Single undertaking	Unnotified
Australia	2014	Bilateral	Distant	--	Early notification
<i>Under negotiation</i>					
Norway	--	Bilateral	Distant	--	Early notification
Gulf Cooperation Council	--	Multi-Partner	Distant	--	Unnotified
South Korea	--	Bilateral	Proximate	--	Unnotified
Japan and Korea	--	Multi-Partner	Proximate	--	Unnotified

*Source:* China Ministry of Commerce; WTO

## Kompleksitas *China-Japan-Korea Free Trade Agreements* (CJK FTA) dan Kaitannya dengan RCEP

CJK FTA merupakan bagian dari tren utama dalam perdagangan global selama dua dekade terakhir dari formasi WTO yang secara umum mengacu pada *preferential trade agreements* (PTAs). Pada tahun 1990, ada sekita 60 PTAs di dunia tetapi pada tahun 2010 jumlah tersebut meningkat menjadi 300 PTAs dengan sekitar setengah dari mereka merupakan RTA di negara-negara anggota mereka berasal dari daerah yang sama, sedangkan PTAs non-regional yang tersisa melibatkan negara-negara anggota yang lebih dari satu wilayah geografis. Rata-rata, negara anggota WTO sekarang memiliki sekitar 15 PTAs.<sup>26</sup> Peningkatan jumlah PTAs telah menyebabkan peningkatan pangsa perdagangan intra-PTA dalam perdagangan global.

Secara bersamaan, CJK FTA bisa bertindak sebagai kerangka untuk dua FTA perjanjian kemitraan besar / ekonomi yang sekarang sedang diikuti. (i) *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di antara 16 negara yang terdiri dari 10 negara ASEAN plus Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru dan (ii) *Trans Pasific Partnership* (TPP) di antara 12 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Sementara itu, ada juga kebangkitan kepentingan dalam APEC FTA antara negara-negara anggota TPP ditambah Indonesia, Filipina, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Rusia,

<sup>26</sup> Madhur, Srinivasa. 2013. China-Japan-Korea FTA: A Dual Track Approach to a Trilateral Agreement. *Journal of Economic Integration: Vol.28 No.3*. hlm 377.

dan Papua New Guinea. Semua ini bahkan memberikan ruang lingkup lebih lanjut untuk CJK FTA menjadi faktor yang mendukung perdagangan multilateral dan liberalisasi investasi dan integrasi baik di tingkat regional dan trans-regional.

Kemungkinan bahwa CJK FTA bisa menjadi tulang punggung dari *region-wide* FTA di Asia atau bisa menjadi kerangka untuk liberalisasi perdagangan multilateral yang lebih luas merupakan argumen yang baik demi keberlangsungan FTA tersebut. Namun, bagi FTA ini, untuk membuahkan hasil, tiga negara yang terlibat perlu memiliki substansial yang baik dan kemauan politik untuk mengejar proyek ini. Dari perspektif politik, CJK FTA dapat menyediakan saluran untuk meredakan ketegangan politik di Asia Timur, yang telah meningkat dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir dan karenanya bisa membantu mewujudkan rekonsiliasi sejarah yang sangat dibutuhkan antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

### **Persaingan RCEP dan *Trans-Pasific Partnership* (TPP) sebagai Bentuk Perjanjian Perdagangan di kawasan Asia-Pasifik**

Asal mula dari RCEP dan TPP layak mendapatkan perhatian lebih karena dalam konteks sejarah memberi penjelasan tentang kecenderungan yang lebih luas dan peristiwa yang telah memuncak dalam kerangka perdagangan regional tersebut. Beberapa faktor tersebut terus membentuk banyaknya perjanjian perdagangan yang sedang dinegosiasikan di kawasan Asia-Pasifik saat ini. Memahami peristiwa dan perkembangan yang telah mempengaruhi kelahiran dan pertumbuhan TPP dan RCEP juga penting untuk memahami keadaan saat ini dan prospek masa depan dari kedua perjanjian *mega-regional*.

Perdagangan di Asia-Pasifik merupakan pengaturan yang logis untuk perjanjian yang baru disebabkan oleh skala dan dinamisme. Dari 14 Triliun dolar AS perdagangan dunia pada tahun 2010, 9 Triliun dolar AS mencakup ekonomi APEC.<sup>27</sup> Disebutkan di atas perdagangan bebas *mega-regional* – RCEP dan TPP, telah menjadi titik fokus utama hubungan ekonomi di Asia-Pasifik (dan bahkan dunia) karena dampak ekonomi mereka, implikasi geopolitik, dan pengaruh potensial pada sistem perdagangan global.

Menurut *World Economic Forum*, perjanjian perdagangan *mega-regional* adalah “topik yang paling penting dalam scenario perdagangan internasional saat ini.” Perjanjian perdagangan *mega-regional* adalah kerjasama integrasi yang mendalam dalam bentuk perjanjian perdagangan regional antara negara-negara atau wilayah dengan pangsa penting perdagangan dunia dan investasi asing langsung (FDI) dan di mana dua atau lebih pihak berada dalam posisi penggerak penting dalam rantai nilai global (yaitu AS, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok). Di luar akses pasar, penekanan dari jenis kerjasama adalah pada kompatibilitas peraturan dan kerangka aturan yang bertujuan menyelaraskan perbedaan dalam investasi dan bisnis. *World Economic Forum* telah menyatakan bahwa baik RCEP maupun TPP masuk ke dalam kategori perjanjian perdagangan *mega-regional*.

Baik RCEP maupun TPP merupakan pengembangan yang relatif baru; maka bukti yang tersedia dan kelimuan yang telah muncul sejak awal negosiasi TPP pada tahun 2009 dan negosiasi RCEP pada tahun 2013 menjadi sangat terbatas. Sebagian besar

---

<sup>27</sup> Xiao, Yifei. 2015. Competitive Mega-regional Trade Agreements: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pasific Partnership (TPP). *CUREJ-College Undergraduate Research Electronic Journal*. Hlm 6.

literatur yang berfokus pada regionalisme di Asia-Pasifik atau Asia Timur cenderung menunjukkan perbedaan antara RCEP dan TPP, tetapi tidak menjelaskan asal-usul dan perkembangan perjanjian dari sudut pandang teoritis. Analisa yang membandingkan dua perjanjian juga cenderung berspekulasi tentang hasil yang mungkin dicapai, upaya satu sama lain, atau menunjukkan perbedaan dan persamaan keduanya, tetapi tidak bicara tentang evolusi yang saling terkait dari kedua kerangka.

Seperti disebutkan, RCEP dan TPP keduanya adalah blok potensial menuju FTAAP yang didukung oleh anggota APEC. Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC tahun 2010 muncul untuk menandai langkah penting menuju penyelesaian pertanyaan tentang bagaimana inisiatif ini terpisah (yaitu jalur Asia Timur dan jalur Trans-Pasifik) akan dipertemukan pada kerangka perdagangan masa depan Asia-Pasifik. Status FTAAP diangkat dari “prospek jangka panjang” dengan instrumen penting untuk memajukan agenda integrasi ekonomi regional APEC. Para pemimpin secara lebih jauh mengatakan bahwa FTAAP harus “dicapai sebagai perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dengan mengembangkan dan membangun usaha regional yang sedang berlangsung, seperti diantaranya ASEAN+3, ASEAN+6 dan TPP.”<sup>28</sup>

## Kesimpulan

Kerjasama antar negara yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi, baik dalam lingkup regional maupun antar regional. Bentuk kerjasama ini juga beragam dari perdagangan internasional, investasi,

perdagangan jasa, kerjasama lingkungan, hingga membentuk *Free Trade Agreement* (FTA). FTA adalah perjanjian antar negara untuk menghapus hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor.

Fenomena ini juga terjadi di kawasan Asia dengan munculnya perjanjian-perjanjian antar negara, bahkan terbentuknya suatu organisasi atau rezim internasional pada level regional. Salah satunya adalah lahirnya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP dibentuk oleh 10 negara ASEAN dan 6 mitra FTA-ASEAN yaitu, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, dan Selandia Baru. Prinsip dasar dari RCEP adalah untuk menyederhanakan aturan-aturan dari FTA ASEAN dengan mitra FTA-ASEAN yang memiliki ketentuan berbeda-beda sehingga menyulitkan pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi atau bentuk kerjasama lainnya.

Pada awalnya RCEP dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2015 dan mulai dijalankan pada tahun 2016. Tetapi target ini tidak bisa dicapai dikarenakan oleh keanekaragaman serta kepentingan yang berbeda dari setiap negara anggota mempengaruhi negosiasi RCEP. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dari tiap negara yang berpartisipasi juga berbeda-beda. Oleh karena itu negosiasi RCEP membutuhkan waktu yang lebih dari target yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai kesepakatan dalam perumusan RCEP.

Selain dari permasalahan diatas, ada masalah lain yang menyangkut beberapa negara anggota RCEP, yaitu kompleksitas yang terjadi di Asia Timur antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tiga negara di Asia Timur ini selalu diliputi masalah yang berbelit-belit dari isu sejarah masa perang,

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 23.



sengketa wilayah dan geopolitik. Yang paling menonjol saat ini adalah panasnya hubungan Tiongkok dan Jepang terkait isu sengketa wilayah Kepulauan Senkaku (Tiongkok menyebutnya Kepulauan Daiyou). Masalah lainnya antara Korea Selatan dengan Jepang mengenai isu ”*jugun ianfu*” atau wanita penghibur tentara Jepang pada masa Perang Dunia II.

Tetapi dibalik masalah yang sedang dihadapi ketiga negara di Asia Timur ini mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan RCEP serta perjanjian perdagangan terpisah ketiga negara setelah pertemuan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1 November 2015. Pada pertemuan ini Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang sepakat bekerja sama demi integrasi ekonomi yang besar. Hal ini membuktikan bahwa ketiga negara lebih mengedepankan kerjasama antar negara demi kepentingan nasional masing-masing daripada memperkeruh suasana dengan masalah yang sedang dihadapi.

Dari sudut pandang Tiongkok, penulis menganalisa bahwa kepentingan Tiongkok berpartisipasi dalam pembentukan RCEP adalah untuk memperluas akses pasar di Asia Timur. Agar tujuan ini dapat tercapai Tiongkok harus memperbaiki hubungan dengan Jepang dan Korea Selatan terlebih dahulu. Salah satunya dengan mengadakan kembali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ketiga negara yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2010. Namun sempat terhenti setelah pertemuan pada tahun 2012 terkait hubungan dengan Jepang yang memanas. KTT ini berhasil berjalan kembali pada pertemuan 1 November 2015 dan berhasil meredakan ketegangan antar negara yang bersangkutan.

Perluasan akses pasar tersebut dapat dicapai apabila RCEP telah selesai

dirumuskan dan telah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari asas-asas RCEP sebagai bentuk dari perjanjian internasional yang berfokus pada kerjasama ekonomi. Secara tidak langsung RCEP dapat menjadi awal terbentuknya integrasi ekonomi di kawasan Asia. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, memudahkan interaksi ekonomi antar negara anggota, tentu akan memberi akses yang luas kepada pasar.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Choi, Youngmi. *Political Economy of Free Trade Agreements in China, Japan, and South Korea: Sectoral and National Security Politics of the FTA Wave*. 2013. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science at The University of Wisconsin-Milwaukee.
- Madhur, Srinivasa. 2013. China-Japan-Korea FTA: A Dual Track Approach to a Trilateral Agreement. *Journal of Economic Integration: Vol.28 No.3*.
- Madhur, Srinivasa. 2013. China-Japan-Korea FTA: A Dual Track Approach to a Trilateral Agreement. *Journal of Economic Integration: Vol.28 No.3*.
- Ohno, Kenichi. *The East Asian Experience of Economic Development and Cooperation*. Desember 2002. National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
- Urata, Sujiro. 2002. Globalization and the Growth in Free Trade Agreements. *Asia-Pacific Review*, Vol.9, No.1
- Xiao, Yifei. 2015. Competitive Mega-regional Trade Agreements: Regional

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pasific Partnership (TPP). *CUREJ-College Undergraduate Research Electronic Journal*.

Weber, Cynthia. *International Relations Theory: A Critical Introduction*, 3<sup>rd</sup> ed. New York: Routledge. 2009.

## Website

## Buku

Aleksius Jemadu. 2005. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Graha Ilmu. Hlm. 231.

Asrudin., Mirza Jaka Surya dkk (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Graha ilmu.

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dam, Sjamsumar., Riswandi (1995). *Kerja Sama ASEAN – Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Diez, Thomas. et. al. 2011. *Key Concepts in International Relation*. London: Sage Publications.

Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO : Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.

Holsti, K. J., 1988. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Juwana, Hikmanto, 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

ASEAN Community. 2015. *Regional Comprehensive Economic Partnership A Coheren Approach towards Economic Integration*. Tersedia di <<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20RCEP.pdf>> diakses pada 25 Juli 2016.

Berland Hutagalung. 29 Februari 2012. *Mencermati Penjajakan Kerjasama Ekonomi Perdagangan Kawasan Asia Timur*. Tersedia di <<http://www.slideshare.net/bermand/mencermati-kerjasama-ekonomi-asia-timur>> diakses pada 12 Juli 2016.

East Asia Forum. 3 Desember 2012. *The Way Forward for RCEP Negotiations*. Tersedia di <<http://www.eastasiaforum.org/2012/12/03/the-way-forward-for-rcep-negotiations/>> diakses pada 15 Juli 2016.

KBS world, 31 Mei 2010. *Pertemuan Korea Selatan-Tiongkok-Jepang mendorong terciptanya Kerjasama Trilateral*. Tersedia di <[http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news\\_issue.htm?no=18468](http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=18468)> diakses pada 17 Desember 2015.

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. *RCEP rugikan sektor jasa dan manufaktur*. Tersedia di <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/8778/RCEP-Rugikan-Sektor-Jasa-dan-Manufaktur>> diakses pada 11 maret 2016

Martinez, E. dan Garcia, A. *What is Neoliberalism?*. Tersedia di <<http://www.corpwatch.org/article.php?id=376>> diakses pada 27 Desember 2015.

Tabloid Diploamsi. 17 Juni 2012. *Kerjasama East Asia Summit Memperkuat*

*Ketahanan dan Daya Saing Kawasan.*  
Tersedia di  
<<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/165-diplomasi-juni-2012/1444-kerja-sama-east-asia-summit-eas-memperkuat-ketahanan-dan-daya-saing-kawasan-.html>> diakses pada 12 Juli 2016.

VOA Indonesia. 1 Mei 2016. *China Ajukan Syarat Perbaikan Hubungan dengan Jepang.* Tersedia di  
<<http://www.voaindonesia.com/a/china-ajukan-syarat-perbaikan-hubungan-dengan-jepang/3309982.html>> diakses pada 1 Juni 2016.

WTO Center. 16 Juli 2015. *Negotiations Update Regional Comprehensive Economic Partnership.* Tersedia di  
<<http://wtocenter.vn/other-agreement/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>> diakses pada 15 Juli 2016.